

Agensi Perempuan Papua dalam Memperjuangkan Perdamaian

Apriani Anastasia

Pendahuluan

Konflik Papua dalam kajian Tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berakar pada persoalan status politik dan persoalan sejarah, pelanggaran HAM dan kekerasan negara, marginalisasi, kegagalan pembangunan, dan diskriminasi terhadap orang asli Papua (Widjojo *et al*, 2012). Akar konflik tersebut hingga kini belum menemui penyelesaian yang bermartabat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut akan tetapi belum ada titik terang penyelesaiannya. Pemerintah masih menggunakan pola-pola yang sangat maskulin yaitu dengan pendekatan keamanan tradisional yang mengandalkan kekuatan militer dengan mengirimkan personel TNI-Polri dalam jumlah yang tidak sedikit dengan alasan pengamanan.

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meredam konflik dan menyelesaikan akar persoalan di Papua dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang diharapkan membawa harapan masyarakat Papua untuk dapat memperbaiki kondisi hidup secara sosial-ekonomi, hak asasi manusia, maupun sosial-politik. Akan tetapi, menurut Elvira Rumkabu, selama 20 tahun UU Otsus diberlakukan tidak membawa dampak besar terutama karena rentetan konflik dan kekerasan terhadap orang Papua tetap terjadi, pelanggaran HAM, dan rasisme. Meskipun ada juga sedikit perubahan kecil yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan beasiswa anak-anak Papua ke luar negeri.¹

Konteks konflik Papua yang berkepanjangan dan bersifat multidimensional turut berdampak pada perempuan Papua bahkan memengaruhi identitas mereka. Kajian

¹ BBC NEWS. UU Otsus Papua Disahkan: "Tidak Ada Jaminan Mengakhiri Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua". BBC News Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57838423> diakses tanggal 21 Agustus 2021

yang dilakukan Meteray (?) mengungkapkan bahwa stigmatisasi dan stereotipe terhadap orang Papua begitu besar dari kelompok masyarakat Indonesia.² Sejarah panjang opresi (tekanan?) terhadap orang Papua memengaruhi cara pandang orang Papua dalam mempersepsikan dirinya. Opresi terhadap identitas juga berdampak pada perempuan Papua.

Lingkaran Opresi

Perempuan Papua tidak hanya teropresi karena sejarah panjang kekerasan negara dan struktural, tetapi berhadapan juga dengan kekerasan budaya terutama budaya patriarki. Patriarki yang melemahkan perempuan terjadi di ruang privat maupun publik, dan menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi. Akan tetapi, perempuan Papua tetap memiliki daya untuk berjuang dan mengambil keputusan di tengah kondisinya yang sulit. Misalnya, sebagai pelindung dan penjaga hutan yang merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat adat, karena mereka bertugas menyediakan makanan dan air di rumah. Selain itu juga, bagi perempuan adat hutan sebagai sumber pengetahuan tradisional³

Pembahasan tentang perempuan Papua tidak dapat dipisahkan dengan identitas yang berlapis yang terlihat dari relasinya di dalam keluarga, komunitas, organisasi, bahkan sampai pada tingkatan negara. Usaha memahami perempuan Papua tidak terlepas dengan konteks sosial dan budaya Papua yang sangat kompleks. Bukan hal sederhana untuk memahami perempuan Papua dan representasinya dalam kebudayaan Papua karena Papua merupakan satu kesatuan wilayah pulau besar yang terdiri dari beragam etnis dan bahasa bukan hanya pada kelompok etnis tertentu.⁴

Berbagai penelitian tentang perempuan Papua banyak mengisahkan tentang situasi kekerasan dan konflik yang berdampak pada perempuan. Perempuan Papua harus

² (???)

³ Papuan Women's Group (PWG) & Asia Justice and Rights (AJAR). *"Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua"*. 2021. Halaman 178

⁴ Muridan S. Widjojo. Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era OTSUS Papua dalam Jurnal Masyarakat Indoensia. VOL. 38, No. 2. Jakarta: LIPI. 2012. Print

berjuang melawan opresi dominasi laki-laki, memperjuangkan hak-hak atas sumber daya alam yang mengganggu kelangsungan hidup mereka, berjuang melawan diskriminasi dan marginalisasi, serta menghadapi dampak dari hambatan secara struktural dan kultural.

Perjuangan perempuan Papua terhadap kekerasan salah satunya digambarkan dalam sebuah hasil pendokumentasian yang berjudul “*Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*”. Dalam pendokumentasian tersebut dijelaskan mengenai kondisi perempuan Papua yang mengalami kekerasan berbasis gender selama empat dekade. Ditemukan tiga tipologi kekerasan yang dialami perempuan Papua: *Pertama*, kekerasan yang didukung dan dilakukan oleh Negara; *kedua*, kekerasan dalam keluarga; dan *ketiga*, kekerasan berlapis yang berdampak pada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Pada saat yang bersamaan, perempuan Papua juga menghadapi diskriminasi dalam adat dan budaya yang melenggangkan kekerasan terhadap perempuan dan menyebabkan pergeseran relasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pengalaman kekerasan itu justru semakin menempa diri perempuan Papua untuk berpikir jernih memahami persoalan yang dialami untuk bertahan hidup.⁵

Ada juga penelitian “Anyam Noken Kehidupan (ANK)-Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM”, yang mendokumentasikan narasi-narasi yang merefleksikan diskriminasi dan kekerasan berlapis terhadap perempuan Papua sejak tahun 2012 hingga 2014. Kekerasan yang dialami perempuan Papua beragam, mulai dari kuatnya nilai patriarki dalam adat dan budaya Papua, hambatan struktural seperti gagalnya penerapan Otsus, kebijakan pembangunan yang tidak responsif gender, pendekatan keamanan teritorial dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Namun, dalam pendokumentasian ANK juga menegaskan bahwa sekalipun perempuan Papua menjadi korban konflik, tetapi memiliki potensi besar sebagai pemimpin perdamaian. Perempuan Papua telah

⁵ Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua. Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009.

memainkan peran perdamaian serta merawat kehidupan di saat maupun sesudah kekerasan dan konflik terjadi.⁶

Kajian lainnya dilakukan oleh *Papuan Women's Working Group* (PWG) dan *Asia Justice and Rights* (AJAR) dalam penelitian yang berjudul "*Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua*". Kajian ini menegaskan bahwa perempuan adat juga mengalami kerentanan akibat posisi mereka yang lemah di dalam adat, sehingga sering terabaikan dan jauh dari ruang partisipasi dalam lembaga adat, tidak memiliki hak atas tanah, dipaksa untuk menikah di bawah umur, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan tersubordinasi.⁷

Identitas dan Agensi

Internalisasi operasi dan subordinasi akan sangat memengaruhi identitas gender dan agensi mereka. Akan tetapi, internalisasi seperti ini juga tidak dengan mudah dihilangkan. Bartky dalam Meyers mengatakan bahwa "*We cannot teach P...how to decolonize the imagination*". Internalisasi operasi seperti yang dialami perempuan Papua menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi konsekuensi logis dari langgengnya struktur patriarkis. Konteks masyarakat patriarkal akan membatasi pemenuhan personal perempuan karena tidak mempedulikan eksplorasi diri dan ekspresi diri dari perempuan tersebut.⁸

Meski demikian, menurut Meyers bahwa dalam struktur masyarakat yang patriarkis dan dalam kondisi tersubordinasi pun, perempuan tetap dapat menggunakan agensinya. Pada konteks Papua, sekalipun ada pandangan terhadap inferioritas perempuan, akan tetapi di dalam ruang itu perempuan Papua masih tetap menunjukkan

⁶ Komnas Perempuan dan TIKI Papua. Pendokumentasian "Anyam Noken Kehidupan". Jakarta: Komnas Perempuan, 2012-2014.

⁷ Papuan Women's Group (PWG) & Asia Justice and Rights (AJAR). "*Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua*". 2021.

⁸ Diana T. Meyers. *Gender in the Mirror Cultural Imagery and Women's Agency*. Oxford University Press. 2002.

<https://oxford.universitypressscholarship.com/mobile/view/10.1093/0195140419.001.0001/acprof-9780195140415>, diakses tanggal 21 Agustus 2021 halaman 3-167

otonominya. Otonomi itu muncul karena adanya kesadaran yang berasal dari pengalaman dan refleksinya. Hal ini penting, dalam konteks opresi, kesadaran terhadap kekuatan diri dan identitasnya adalah langkah penting dalam emansipasi sebuah identitas. Dalam banyak kasus, opresi diinternalisasi di ruang personal, interpersonal dan institusi sehingga melanggengkan opresi terhadap perempuan yang dibangun dari kesadaran dan *knowledge* terhadap dirinya sendiri dan kemudian berperan dalam otonomi perempuan.

Oleh karena itu, yang paling penting adalah memastikan bahwa perempuan Papua dapat meningkatkan kemampuan agensinya (*agentic skills*) sebagai bentuk perlawanan terhadap opresi. Menurut Meyers, otonomi yang harus dimiliki perempuan bukanlah sekedar apa yang sering dikatakan bahwa ‘saya harus menjadi diri sendiri’ atau ‘saya selalu jujur terhadap diri saya sendiri’, tetapi ada makna yang lebih luas. Individu yang otonom adalah mereka yang “*rely on their own judgement. They know who they are-what really matters to them, whom they deeply care about, what their capacities and limitations actually are, and so forth- and they enact the introspective understanding of their ‘true’ selves in their everyday lives*”. Dengan demikian, otonomi seorang perempuan bukanlah sekedar keterlibatannya dalam pembuatan keputusan, tetapi tentang bagaimana dia memiliki penilaian sendiri, tahu apa yang penting untuk diperjuangkan, memahami apa yang menjadi kapasitas dan sekaligus keterbatasannya, dan juga pemahaman atas dirinya sendiri dalam kesehariannya. Dengan kata lain, ada keharmonisan antara identitasnya, sikapnya dan juga tindakannya.

Dari hasil penelitian-penelitian yang ada saya melihat bagaimana perempuan Papua menggunakan kemampuan dan kompetensi mereka dengan selalu berefleksi, penuh pertimbangan, dan mengambil keputusan yang otentik yang sesuai dengan keyakinan terhadap diri sendiri. Dan tentu saja itu merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap berbagai bentuk opresi yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua. *Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*.

Komnas Perempuan dan TIKI Papua. *Pendokumentasian "Anyam Noken Kehidupan"*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012-2014.

Meyers, Diana Tietjens. *Gender in the Mirror Cultural Imagery and Women's Agency*. Oxford University Press. 2002.
<https://oxford.universitypressscholarship.com/mobile/view/10.1093/0195140419.001.0001/acprof-9780195140415>, diakses tanggal 21 Agustus 2021 halaman 3-167

Papuan Women's Group (PWG) & Asia Justice and Rights (AJAR). 2021. "*Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua*". 2021. Halaman 178

Widjojo, Muridan S., 2012. *Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era OTSUS Papua dalam Jurnal Masyarakat Indoensia*. Vol. 38, No. 2. Jakarta: LIPI. 2012.
Print

